

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan merupakan tanggung jawab dari berbagai pihak. Elemen masyarakat seperti pemerintahan, komunitas, hingga media sangat dibutuhkan dalam upaya menjaga dan melestarikan lingkungan. Lingkungan yang kita tinggali pada saat ini juga memiliki keterbatasan dalam penyediaan sumber daya. Eksploitasi alam yang berlebihan menjadi salah satu faktor rusaknya lingkungan, hal ini juga berdampak pada habisnya sumber daya alam yang tersedia, pemanasan global serta perubahan iklim (Kadarisman, 2019).

Secara umum pola hidup masyarakat bergantung pada bahan yang terbuat dari plastik, seperti sedotan plastik, kantong kresek, dan gelas plastik. Kegunaan dari barang tersebut biasanya hanya sekali pakai setelah itu dibuang. Penggunaan plastik yang begitu banyak berdampak pada sampah yang sulit diurai oleh ekosistem. Indonesia dinobatkan sebagai negara penghasil sampah plastik laut terbesar kedua di dunia setelah negara Tiongkok. Menurut data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022 sampah plastik di Indonesia mencapai 70 juta ton per tahunnya, sementara 3,2 juta ton dibuang ke lautan.

Akibat dari permasalahan itu muncul regulasi terkait pengendalian sampah plastik yang telah diatur dalam Perwako No. 36 Tahun 2018 yang bertujuan untuk mengurangi pemakaian sampah plastik. Sesuai edaran pemerintah tersebut beberapa pihak swasta dan NGO (*Non Governmental Organization*) sudah mulai mengkomunikasikan bahaya dari dampak yang ditimbulkan akibat sampah plastik.

Beberapa cara mereka lakukan untuk mengkampanyekan kepada masyarakat agar mengurangi pemakaian plastik. Mulai dari mengajak dalam bentuk iklan masyarakat, membuat produk-produk yang ramah lingkungan, serta kegiatan aksi bersih yang dilakukan di lokasi padat sampah.

Dalam hal ini, pemerintah perlu membuat kebijakan dengan mendukung sepenuhnya gerakan lingkungan. Beberapa pemerintah di daerah sudah menerapkan kebijakan larangan penggunaan barang-barang yang terbuat dari plastik, misalnya swalayan tidak menyediakan tas kresek untuk membawa barang belanjaan. Tetapi imbauan tersebut sulit untuk diimplementasikan oleh masyarakat, karena pengelolaan sampah yang kurang efektif dan perilaku buruk dari masyarakat dalam memandang sampah plastik.

Limbah rumah tangga sangat membahayakan ekosistem dan hewan laut karena dengan mudah mengonsumsi limbah-limbah tersebut dan berujung kepada kepunahan ekosistem. Kampanye pemakaian plastik berulang kali mulai digaungkan oleh komunitas-komunitas yang memang fokus menyuarakan dan peduli terhadap lingkungan, salah satunya Yayasan Rimba Indonesia. Yayasan Rimba Indonesia berfokus pada tiga program yaitu, rumah pendidikan, rumah pengolahan sampah plastik dan konservasi penyu. Adapun alasan dibentuknya Yayasan Rimba Indonesia dikarenakan banyaknya timbunan sampah terutama jenis plastik pada kawasan pantai dan sekitaran pulau di Sungai Pinang.

Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan di Yayasan Rimba Indonesia pada tanggal 14 Januari 2022, rumah pengolahan sampah plastik bertujuan sebagai bank sampah bagi masyarakat Sungai Pinang. Sampah yang telah dikumpulkan diolah kembali menjadi BBM, alat yang digunakan merupakan satu-

satunya di Sumatera. Tidak memadainya TPS (Tempat Pembuangan Sementara) Sungai Pinang menjadi salah satu faktor penyebab masyarakat membuang sampah sembarangan, sampah rumah tangga biasanya ditumpuk dan dibakar begitu saja. Dampak asap pembakaran sampah plastik tidak baik untuk kesehatan karena terdapat kandungan yang berbahaya bagi tubuh.

Plastik merupakan produk serbaguna, ringan dan fleksibel. Plastik banyak digunakan dalam keseharian karena alasan praktis serta mudah didapatkan, plastik juga tahan terhadap kelembaban dengan harga relatif murah. Karena berbagai kemudahan tersebut, masyarakat tidak bisa lepas dari bahan plastik dan selalu menggunakan bahan material plastik untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sampah plastik tidak hanya berasal dari kemasan-kemasan produk makanan minuman tetapi juga berasal dari kantong belanja plastik. Hal tersebut bisa dilihat dari kebiasaan masyarakat yang selalu menggunakan kantong belanja plastik saat berbelanja di pasar maupun tempat perbelanjaan keramaian lainnya (Migristine, 2020).

Secara umum pola penanganan sampah di Indonesia kebanyakan menggunakan pola sentralisasi, dengan pelaksanaan sistem *open dumping* di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Penyaluran sampah terdiri dari pengumpulan sampah dari pemukiman lalu diangkut untuk dibuang ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan terakhir yaitu pembuangan di TPA. Permasalahan pengelolaan sampah yang ada di Indonesia dapat dilihat dari beberapa faktor yaitu tingginya jumlah sampah yang dihasilkan, tingkat pengelolaan pelayanan masih rendah, TPA yang jumlahnya terbatas, institusi pengelola sampah dan masalah biaya (Dinas Lingkungan Hidup, 2019).

Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat menyatakan Kabupaten dan Kota di Provinsi tidak serius dalam menanggapi permasalahan sampah. Hal ini dikemukakan langsung oleh Kepala Dinas DLH Sumbar Siti Aisyah, Senin 30 Agustus 2021. Di Kota Padang sendiri mencapai angka 62,8 ton sampah yang tidak terkelola, sampah-sampah tersebut cukup banyak ditemukan di muara sungai, daerah pesisir pantai, serta di tempat-tempat yang memang sengaja dijadikan penumpukan sampah. Siti Aisyah mengungkapkan, upaya pengelolaan sampah yang dilakukan harus melalui dua pola yakni pengurangan jumlah timbunan sampah dari sumber melalui metode 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) dan penanganan sampah mulai dari pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir di TPA.

Data KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan) menunjukkan Sumbar berada pada posisi ke-11 tentang persentase rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah yakni hanya 8,6% rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah. Upaya pengurangan sampah dari sumber merupakan langkah strategis yang perlu dilakukan dengan dukungan semua pihak, antara pemerintah dan masyarakat. Pemprov Sumatera Barat sendiri telah melakukan beberapa upaya, salah satunya menggunakan teknologi pemusnah sampah *hydrodrive* untuk pengolahan sampah di TPA.

Secara umum sampah yang berserakan dan tidak pada tempatnya akan bersarang di pembuangan air dan bermuara menuju laut. Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pinggir pantai dengan garis pantai sepanjang 218 kilometer dan memiliki 57 pulau serta dialiri sebanyak 18 sungai. Agar berbagai kekuatiran itu bisa diminimalisir dan diantisipasi, sehingga pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten

Pesisir Selatan, melalui Dinas Lingkungan Hidup tetap konsisten memerangi permasalahan sampah di daerah. Berbagai cara telah dilakukan diantaranya melalui pengurangan pemakaian kantong kresek sekali pakai yang diganti dengan keranjang plastik di berbagai pasar tradisional setiap kecamatan.

Selain itu KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) melalui BPSPL (Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut) Padang bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat, Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan kerap melakukan pembelajaran tentang pengelolaan sampah plastik kepada siswa-siswi di beberapa sekolah. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjadikan siswa-siswi sebagai agen perubahan dalam merehabilitasi ekosistem pesisir. Adapun rangkaian kegiatan terdiri dari pemaparan materi dan dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat.

Tidak hanya dari pemerintah, sejumlah komunitas yang peduli akan isu sampah di Sumatera Barat menggelar diskusi bersama pemerintah provinsi dan pemerintah Kota Padang pada 30 Oktober 2019. Diskusi diadakan guna mendorong kerjasama pihak antara pemerintah dengan non pemerintah khususnya pada permasalahan sampah, dibutuhkan sinergi masyarakat untuk menyukseskan penanganan sampah di Provinsi Sumatera Barat terutama di tingkat rumah tangga. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan juga selalu mendukung segala kegiatan aksi bersih pantai maupun aksi bersih di tempat kerumunan objek wisata. Aksi bersih secara serentak diseluruh dunia atau biasa disebut WCD (World Cleanup Day) 2021 diprakarsai oleh PT. Pegadaian, Pangea Movement, Bank Sampah Panca Daya, serta komunitas-komunitas peduli sampah lainnya yang dilaksanakan di Pantai Muaro Lasak.

Yayasan Rimba Indonesia telah banyak menerima penghargaan dari tokoh masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung, salah satunya Azli Bagindo Alam selaku Wali Nagari Sungai Pinang mendukung penuh kegiatan dari Yayasan Rimba Indonesia. Yayasan Rimba Indonesia aktif dalam berbagai kegiatan seperti aksi bersih pantai, sosialisasi, penyuluhan serta kampanye yang berhubungan dengan lingkungan. Yayasan ini menjalankan kegiatan secara mandiri maupun kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama dilakukan demi mencapai tujuan dan pengembangan komunitas peduli lingkungan. Tidak hanya itu Yayasan Rimba Indonesia turut menyebarkan pesan-pesan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa Yayasan Rimba Indonesia telah menjalankan komunikasi lingkungan.

Komunikasi Lingkungan merupakan cabang disiplin ilmu komunikasi. Komunikasi lingkungan adalah suatu proses komunikasi yang mendukung suatu kebijakan dalam prosesnya dilakukan secara terencana dan strategis untuk membuat masyarakat berpartisipasi dan dalam pelaksanaannya diarahkan pada kelestarian lingkungan. Menurut Robert Cox (Cox, 2010) komunikasi lingkungan adalah sarana pragmatis dan konstitutif untuk memberikan pemahaman mengenai lingkungan kepada masyarakat, seperti halnya hubungan kita dengan alam semesta. Hal ini adalah media simbolis yang digunakan dalam mengkonstruksi masalah lingkungan dan menegosiasikan respon yang berbeda dalam masyarakat. Melalui kerangka pemahaman ini, komunikasi lingkungan membawa pada pemahaman bahwa alam seperti hutan, gunung, sungai sebagai ancaman ataupun sebagai sahabat, menghormati sumber daya alam sebatas eksploitasi atau sebagai sistem pendukung kehidupan (Yenrizal, 2015).

Dalam komunikasi terdapat empat aspek yang terkait, antara lain kampanye lingkungan, advokasi lingkungan, pendidikan lingkungan dan penguatan sistem informasi tentang lingkungan. Opini publik adalah suatu capaian yang mesti direbut. Itulah peran media massa, media kampanye, NGO, akademisi dalam memainkan perannya sehingga kasus dapat terangkat ke level isu kebijakan publik. Melalui kampanye dan advokasi lingkungan yang dilakukan Yayasan Rimba Indonesia, maka kesadaran, pemberdayaan, perlindungan dan pengawasan lingkungan akan lebih efektif. Selain itu komunikasi lingkungan bertujuan untuk mengkomunikasikan berbagai bentuk kerusakan lingkungan serta bagaimana upaya penyelamatannya.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian mengenai komunikasi lingkungan yang dilakukan Yayasan Rimba Indonesia menarik untuk ditelaah mengingat diperlukannya komunikasi lingkungan dalam penanganan sampah plastik yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana bentuk penerapan komunikasi lingkungan dalam penanganan sampah plastik oleh Yayasan Rimba Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang tertera, maka telah dipaparkan fenomena yang akan diteliti yaitu bagaimana strategi komunikasi lingkungan dalam program penanganan sampah plastik oleh Yayasan Rimba Indonesia. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi dalam penanganan sampah plastik oleh Yayasan Rimba Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian bertujuan untuk:

1. Menganalisis strategi komunikasi lingkungan dalam penanganan sampah plastik oleh Yayasan Rimba Indonesia di Sungai Pinang, Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Mengetahui hambatan komunikasi lingkungan pada penanganan sampah plastik oleh Yayasan Rimba Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi yang ingin mempelajari lebih dalam tentang komunikasi lingkungan dalam mengubah perilaku masyarakat.
2. Menerapkan secara langsung pendidikan komunikasi lingkungan dalam mengimplementasikan penanganan sampah plastik.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian ilmu komunikasi yang berkaitan dengan komunikasi lingkungan yang saat ini masih belum terlalu banyak kajiannya.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Sebagai bahan rujukan bagi komunitas dan kelompok masyarakat yang aktif pada strategi komunikasi lingkungan dalam penanganan sampah plastik.
2. Sebagai masukan bagi Pemkab Pesisir Selatan dalam melakukan komunikasi lingkungan dengan tujuan untuk mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan.

3. Sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi bagi masyarakat Pesisir Selatan maupun daerah-daerah lainnya di Indonesia dalam pengurangan dan penanganan sampah sehingga mencapai target nasional.

